

## BAB V

### SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di SD Negeri 131/IV Kota Jambi, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SD Negeri 131/IV Kota Jambi telah mulai dijalankan, namun masih bersifat terbatas dan informal. Sosialisasi dilakukan secara lisan melalui rapat guru, tanpa dokumen kebijakan yang sistematis. Koordinasi antara kepala sekolah, GPK, dan orang tua siswa berjalan cukup baik, namun belum melibatkan seluruh elemen guru secara menyeluruh. Peran GPK dijalankan secara mandiri berdasarkan pengalaman pribadi, tanpa panduan resmi atau struktur formal dari sekolah.
2. Strategi pembelajaran guru menunjukkan adanya pergeseran dari metode konvensional seperti ceramah ke arah pendekatan yang lebih aktif dan partisipatif, seperti diskusi kelompok dan *Project-Based Learning* (PjBL). Pergeseran ini mencerminkan penyesuaian terhadap Kurikulum Merdeka yang menekankan fleksibilitas dan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Namun, pelaksanaannya belum merata dan masih membutuhkan penguatan melalui pelatihan berkelanjutan.
3. Hambatan dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusi mencakup keterbatasan jumlah GPK, minimnya fasilitas dan alat bantu belajar untuk anak berkebutuhan khusus (ABK), rendahnya pemahaman guru terhadap

kebijakan inklusi, serta kurangnya pelatihan dan dukungan dari pemerintah. Hambatan ini bersifat sistemik dan struktural, sehingga memerlukan intervensi lebih dari berbagai pihak.

## **5.2 Implikasi**

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting, baik secara teoritis maupun praktis:

### **1. Implikasi Teoritis:**

Penelitian ini memperkuat relevansi teori konstruktivisme dalam konteks pendidikan inklusi, khususnya dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Peran guru sebagai fasilitator menjadi sangat penting untuk mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusi bukan hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada perubahan paradigma pembelajaran.

### **2. Implikasi Praktis:**

Diperlukan peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan tentang pendidikan inklusi dan strategi pembelajaran aktif. Sekolah juga perlu menyusun pedoman kerja formal bagi GPK dan mengalokasikan anggaran untuk penyediaan media ajar khusus bagi siswa ABK. Pemerintah daerah perlu hadir secara konkret melalui program dukungan dan regulasi teknis yang menjamin keberlangsungan pendidikan inklusi di tingkat satuan pendidikan dasar.

### 5.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

#### 1. Untuk Sekolah (SD Negeri 131/IV Kota Jambi):

- a. Menyusun dokumen resmi terkait peran GPK dan kebijakan internal tentang pelaksanaan pendidikan inklusi.
- b. Mendorong semua guru untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan pembelajaran inklusi melalui forum kolaboratif dan pelatihan internal.
- c. Mengembangkan media dan metode pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan siswa ABK, seperti penggunaan alat bantu visual, modul individual, dan asesmen diferensiatif.

#### 2. Untuk Guru dan GPK:

- a. Terus mengembangkan kompetensi profesional melalui pelatihan mandiri dan kolaboratif, baik formal maupun informal.
- b. Menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik, mengintegrasikan pendekatan aktif seperti PjBL dan diskusi kelompok dalam pembelajaran.

#### 3. Untuk Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan:

- a. Memberikan pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi seluruh pendidik tentang pendidikan inklusi dan implementasi Kurikulum Merdeka.
- b. Menyediakan anggaran khusus untuk pengadaan sarana pembelajaran inklusi dan penambahan tenaga pendidik khusus.

- c. Menetapkan regulasi teknis sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan inklusi di satuan pendidikan dasar.